



Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Tegalondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Melalui Pendampingan Rapat Koordinasi

Strengthening Institutional Capacity and Organizational Governance of the Nahdlatul Ulama Branch Board of Tegalondo, Karangploso District, Malang Regency through Coordination Meeting Assistance

Abdul Wahid Mahsuni

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Malang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: abdulwahid_fe@unisma.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 22 April 2026;

Revisi: 24 Mei 2026;

Diterima: 28 Juni 2026;

Terbit: 30 Juni 2026

Keywords: *Community Empowerment; Coordination Meeting; Institutional Capacity; Organizational Governance; Nahdlatul Ulama.*

Abstract. *This community service program aimed to strengthen the institutional capacity and organizational governance of the Nahdlatul Ulama (NU) Branch Board (Pengurus Ranting) of Tegalondo Village, Karangploso District, Malang Regency. Religious community organizations at the village level frequently face challenges of weak administrative order, limited coordination among sub-village units, and low regeneration of local leadership. Using a participatory approach based on Asset-Based Community Development (ABCD), the program was carried out through mentoring a coordination meeting held on Sunday, June 14, 2026, attended by 25 board members and community representatives from Gondang, Ketangi, Babatan, and the IKIP housing complex. The activities included organizational mapping, facilitation of deliberation (musyawarah), preparation of a work program plan, and strengthening administrative documentation. The results showed increased participation of board members, including women (Muslimat) representatives, the formulation of an agreed work program, improved meeting administration, and stronger silaturahmi (social cohesion) among sub-village units. This program indicates that participatory mentoring of coordination meetings is an effective entry point for building sustainable governance of village-level religious organizations.*

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (NU) Desa Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Organisasi keagamaan di tingkat desa umumnya menghadapi persoalan lemahnya tertib administrasi, terbatasnya koordinasi antar-unit dusun, serta rendahnya regenerasi kepemimpinan lokal. Dengan pendekatan partisipatif berbasis Asset-Based Community Development (ABCD), program dilaksanakan melalui pendampingan rapat koordinasi pada hari Ahad, 14 Juni 2026, yang dihadiri 25 pengurus dan perwakilan masyarakat dari Dusun Gondang, Ketangi, Babatan, dan Perumahan IKIP. Kegiatan meliputi pemetaan organisasi, fasilitasi musyawarah, penyusunan rencana program kerja, dan penguatan dokumentasi administrasi. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya partisipasi pengurus termasuk unsur perempuan (Muslimat), tersusunnya program kerja yang disepakati bersama, membaiknya tertib administrasi rapat, serta menguatnya silaturahmi antar-unit dusun. Program ini menunjukkan bahwa pendampingan rapat koordinasi secara partisipatif merupakan pintu masuk yang efektif untuk membangun tata kelola organisasi keagamaan tingkat desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kapasitas Kelembagaan; Nahdlatul Ulama; Pemberdayaan Masyarakat; Rapat Koordinasi; Tata Kelola Organisasi.

1. PENDAHULUAN

Desa Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, merupakan wilayah dengan basis sosial keagamaan yang kuat, di mana Nahdlatul Ulama (NU) menjadi organisasi kemasyarakatan Islam yang paling berpengaruh dalam kehidupan warga. Pengurus Ranting NU Tegalondo yang bersekretariat di Dusun Gondang membawahi beberapa unit wilayah, yaitu Dusun Gondang, Dusun Ketangi, Dusun Babatan, dan kawasan Perumahan IKIP. Sebagai organisasi di tingkat akar rumput, ranting NU memegang peran strategis dalam pembinaan keagamaan, penguatan modal sosial, dan penggerakan partisipasi warga (Aziz, 2021; Zulkarnain, 2021).

Meskipun demikian, hasil observasi awal dan dialog dengan pengurus menunjukkan sejumlah persoalan yang lazim dihadapi organisasi keagamaan tingkat desa, antara lain: (1) belum tertatanya administrasi dan dokumentasi organisasi secara baik; (2) koordinasi antar-unit dusun yang belum berjalan rutin dan terstruktur; (3) belum tersusunnya program kerja tertulis yang disepakati bersama; serta (4) kebutuhan regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan lokal (Hasan, 2021; Sulaiman & Anwar, 2023). Kondisi ini apabila dibiarkan berpotensi melemahkan efektivitas organisasi dalam melayani jamaah dan masyarakat.

Penguatan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*) merupakan prasyarat keberlanjutan organisasi kemasyarakatan (Mulyadi, 2021; Wibowo & Handayani, 2022). Dalam konteks organisasi keagamaan berbasis komunitas, penguatan kapasitas tidak cukup dilakukan melalui pelatihan formal semata, melainkan perlu masuk melalui mekanisme sosial yang sudah hidup di masyarakat, seperti forum musyawarah dan rapat koordinasi (Putra & Wahyuni, 2022). Rapat koordinasi yang difasilitasi secara partisipatif dapat menjadi wahana pembelajaran organisasi sekaligus konsolidasi sosial (Arifin & Hidayat, 2022).

Berdasarkan analisis situasi tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat memilih Pengurus Ranting NU Tegalondo sebagai subjek dampingan dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi melalui pendampingan rapat koordinasi. Perubahan sosial yang diharapkan meliputi terbangunnya tertib administrasi organisasi, tersusunnya rencana program kerja bersama, meningkatnya partisipasi seluruh unsur pengurus termasuk perempuan (Muslimat), serta menguatnya silaturahmi dan kohesi sosial antar-unit dusun (Muhaimin & Zubaidah, 2022; Soetomo, 2018).

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis Asset-Based Community Development (ABCD), yaitu pendekatan yang bertumpu pada aset, potensi, dan kekuatan yang telah dimiliki komunitas dampingan (Dureau, 2013; Nugroho & Prasetyo, 2023). Aset utama yang diidentifikasi meliputi modal sosial jamaah yang kuat, tradisi musyawarah dan silaturahmi, tokoh-tokoh lokal yang dihormati, serta sekretariat organisasi yang aktif di Dusun Gondang.

Subjek pengabdian adalah Pengurus Ranting NU Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, beserta perwakilan warga dari Dusun Gondang, Ketangi, Babatan, dan Perumahan IKIP. Kegiatan ini berupa pendampingan rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Ahad, 14 Juni 2026, ba'da Isya' (pukul 19.00 WIB), bertempat di kediaman Bapak Nur Yasin, S.Pd., M.Pd. (Perum IKIP Blok 2-I No. 8, Malang), dan dihadiri oleh 25 peserta.

Subjek dampingan dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan, mulai dari penentuan agenda, waktu, dan tempat kegiatan, hingga perumusan keputusan rapat. Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator yang mendampingi jalannya musyawarah, membantu penataan administrasi (undangan, daftar hadir, notulen), serta memfasilitasi penyusunan rencana program kerja dan rencana tindak lanjut (Chambers, 2017; Rahardjo, 2020). Tahapan kegiatan pengabdian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

3. HASIL

Kegiatan pendampingan rapat koordinasi berjalan lancar dan dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri atas unsur pengurus harian (rais, katib, wakil bendahara), perwakilan unit dusun, serta unsur perempuan (Muslimat/Fatayat). Sebaran peserta berdasarkan asal dusun/unsur disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Peserta Rapat Koordinasi Berdasarkan Asal Dusun/Unsur

No	Asal Dusun/Unsur	Jumlah Peserta	Persentase (%)
1	Dusun Gondang	10	40,0
2	Dusun Ketangi	3	12,0
3	Dusun Babatan	3	12,0
4	Perum IKIP	3	12,0
5	Unsur pengurus/lainnya	6	24,0
	Jumlah	25	100,0

Sumber: Daftar hadir rapat koordinasi, 14 Juni 2026 (diolah).

Dinamika proses pendampingan menunjukkan partisipasi aktif seluruh peserta. Rapat dibuka dengan pembacaan tawassul dan doa bersama, dilanjutkan pengantar dari tuan rumah dan pengurus harian, kemudian musyawarah membahas konsolidasi organisasi, penataan administrasi, dan rencana program kerja ranting. Suasana musyawarah yang berlangsung dalam bingkai silaturahmi terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Suasana Musyawarah Pengurus Ranting NU Tegalondo



Gambar 3. Jajaran Pengurus dan Perwakilan Unit Dusun dalam Rapat Koordinasi

Hasil-hasil pokok yang dicapai dari kegiatan ini meliputi: (1) tertatanya administrasi rapat berupa undangan resmi, daftar hadir bertanda tangan, dan notulen keputusan; (2) tersusunnya rencana program kerja ranting yang disepakati bersama, mencakup penguatan kegiatan keagamaan rutin, penataan keanggotaan, dan koordinasi berkala antar-unit dusun; (3) terbangunnya kesepakatan jadwal rapat koordinasi lanjutan secara bergilir di tiap dusun; serta

(4) meningkatnya keterlibatan unsur perempuan (Muslimat) dalam forum pengambilan keputusan organisasi, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Partisipasi Unsur Perempuan (Muslimat) dalam Rapat Koordinasi.

Perubahan sosial yang mulai tampak antara lain munculnya kesadaran baru pengurus akan pentingnya tertib organisasi, menguatnya peran pemimpin lokal (local leader) di masing-masing dusun sebagai simpul koordinasi, serta tumbuhnya pranata baru berupa mekanisme rapat koordinasi berkala yang terdokumentasi.

4. DISKUSI

Temuan kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa forum musyawarah yang telah hidup dalam tradisi komunitas Nahdliyin merupakan aset sosial yang sangat efektif sebagai pintu masuk penguatan kelembagaan (Dureau, 2013; Nugroho & Prasetyo, 2023). Alih-alih memperkenalkan struktur atau prosedur baru dari luar, pendampingan yang menempel pada mekanisme sosial yang sudah ada terbukti lebih mudah diterima dan lebih berpotensi berkelanjutan (Ife & Tesoriero, 2016; Mardikanto & Soebiato, 2019).

Meningkatnya tertib administrasi rapat, dari undangan hingga notulen, sejalan dengan temuan Kurniawan dan Sari (2023) bahwa pendampingan tata kelola dokumen merupakan intervensi sederhana namun berdampak besar terhadap akuntabilitas organisasi kemasyarakatan. Dokumentasi yang baik menjadi memori organisasi yang memungkinkan kesinambungan program lintas periode kepengurusan (Mulyadi, 2021).

Keterlibatan unsur perempuan (Muslimat) dalam rapat koordinasi menunjukkan inklusivitas forum pengambilan keputusan, yang menurut Muhaimin dan Zubaidah (2022) merupakan indikator penting penguatan modal sosial organisasi keagamaan di tingkat desa. Kehadiran peserta lintas dusun juga memperkuat kohesi sosial dan memperluas jejaring koordinasi organisasi (Putra & Wahyuni, 2022; Zulkarnain, 2021).

Secara teoretis, proses yang berlangsung dapat dibaca sebagai penguatan kapasitas kelembagaan melalui pembelajaran sosial (social learning), di mana pengurus belajar mengelola organisasi sambil menjalankan fungsi organisasinya sendiri (Chambers, 2017; Fahrudin, 2020). Hal ini selaras dengan khittah dan tradisi fiqih sosial NU yang menempatkan musyawarah dan kemaslahatan jamaah sebagai basis gerakan (Mahfudh, 2019; Siddiq, 2018). Munculnya pemimpin lokal di tiap dusun sebagai simpul koordinasi mengindikasikan awal transformasi sosial menuju organisasi yang lebih mandiri dan berkelanjutan (Wibowo & Handayani, 2022; Soetomo, 2018).

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan rapat koordinasi Pengurus Ranting NU Tegalondo berhasil memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi, yang ditandai oleh tertatanya administrasi rapat, tersusunnya rencana program kerja bersama, meningkatnya partisipasi pengurus lintas dusun termasuk unsur perempuan, serta terbentuknya mekanisme koordinasi berkala. Secara reflektif, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis aset (ABCD) yang menempel pada tradisi musyawarah dan silaturahmi komunitas merupakan strategi yang tepat untuk penguatan organisasi keagamaan tingkat desa. Direkomendasikan agar pendampingan dilanjutkan pada aspek digitalisasi administrasi organisasi, kaderisasi pengurus muda, dan penyusunan program kerja tahunan yang terukur, serta agar rapat koordinasi berkala dilembagakan secara bergilir di seluruh unit dusun.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, atas kepercayaan dan kerja samanya; kepada Bapak Nur Yasin, S.Pd., M.Pd. selaku tuan rumah kegiatan; kepada seluruh pengurus dan perwakilan warga Dusun Gondang, Ketangi, Babatan, dan Perumahan IKIP yang telah berpartisipasi aktif; serta kepada institusi/lembaga (LPPM) yang telah mendukung terselenggaranya program pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z., & Hidayat, R. (2022). Penguatan tata kelola organisasi keagamaan berbasis komunitas di tingkat desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2), 145–156.
- Aziz, A. (2021). Nahdlatul Ulama dan pemberdayaan masyarakat pedesaan: Perspektif sosiologi organisasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 33–48.
- Bakri, M., & Susanto, H. (2023). Pendampingan manajemen organisasi kemasyarakatan Islam di Kabupaten Malang. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 5(1), 12–24.
- Chambers, R. (2017). *Can we know better? Reflections for development*. Practical Action Publishing.
- Dureau, C. (2013). *Pembaru dan kekuatan lokal untuk pembangunan*. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II.
- Fadli, M., & Rahmawati, N. (2022). Model penguatan kapasitas kelembagaan organisasi sosial keagamaan melalui pendekatan partisipatif. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 89–101.
- Fahrudin, A. (2020). *Pemberdayaan, partisipasi, dan penguatan kapasitas masyarakat*. Humaniora.
- Hasan, N. (2021). Regenerasi kepemimpinan organisasi Islam di tingkat akar rumput. *Jurnal Studi Keislaman*, 21(2), 210–225.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, A., & Sari, D. P. (2023). Penguatan administrasi organisasi kemasyarakatan melalui pendampingan tata kelola dokumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 6(3), 178–190.
- Mahfudh, S. (2019). *Nuansa fiqih sosial* (Edisi revisi). LKiS.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Muhaimin, A., & Zubaidah, S. (2022). Peran Muslimat NU dalam penguatan modal sosial masyarakat desa. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 6(1), 55–68.
- Mulyadi, D. (2021). Manajemen organisasi nirlaba berbasis nilai keagamaan. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 12(3), 201–214.
- Nugroho, H., & Prasetyo, B. (2023). Asset-Based Community Development (ABCD) sebagai strategi pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 44–57.
- Putra, R. A., & Wahyuni, S. (2022). Musyawarah sebagai instrumen tata kelola organisasi komunitas muslim pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 133–147.
- Rahardjo, M. (2020). *Metodologi pengabdian masyarakat berbasis riset partisipatoris*. UIN-Maliki Press.
- Siddiq, A. (2018). *Khittah Nahdliyah* (Cetakan ulang). Khalista.
- Soetomo. (2018). *Pemberdayaan masyarakat: Mungkinkah muncul antitesisnya?* Pustaka Pelajar.

- Sulaiman, M., & Anwar, K. (2023). Penguatan kelembagaan ranting organisasi keagamaan melalui rapat koordinasi terstruktur. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(2), 98–110.
- Wibowo, A., & Handayani, T. (2022). Kepemimpinan lokal dan transformasi sosial pada organisasi kemasyarakatan. *Jurnal Kepemimpinan dan Kebijakan*, 9(1), 15–29.
- Zulkarnain, I. (2021). Modal sosial jamaah dan keberlanjutan organisasi keagamaan tingkat desa. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 14(2), 167–182.